

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tercapainya perekonomian yang baik dan untuk mengatur jalannya perekonomian negara maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dan penting dalam hal ini. Dimana dengan adanya pemerintah maka diharapkan dapat menjadi alokasi sumber daya, peran sebagai regulator, kesejahteraan sosial, mengelola ekonomi makro dan masih banyak lagi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintahan Indonesia telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual diseluruh satuan kerja baik satuan kerja daerah maupun pusat, pengimplementasian ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja serta hasil kerja pemerintah.

Berbagai macam masalah pemerintahan yang terjadi acap kali disebabkan adanya ketidakmemadainya penggunaan teknologi informasi dalam memimpin suatu daerah, sehingga dalam hal pelaporan kualitas keuangan suatu daerah masih belum jelas dan belum dapat dipahami oleh sebagian masyarakat umum, sehingganya dibutuhkan adanya penggunaan teknologi informasi pada daerah sangat dibutuhkan karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan pemerintahan, pelaku bisnis maupun masyarakat umum, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memberikan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan dipahami

dan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang lebih efisien.

Laporan keuangan pemerintah akan dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada DPR/DPRD dan juga masyarakat umum dan terlebih dahulu diaudit oleh lembaga negara yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, Yusuf dalam (Pavitasari, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, berikut merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Dalam hal tersebut jelas bahwa dalam suatu daerah dapat mengelola keuangannya sesuai dengan sistem akuntansi keuangan yang ada sehingga hasil akhir dari laporan keuangan suatu daerah dapat meningkat. Adanya SAKD ini dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan data terkait lainnya yang menjadi sebuah informasi yang dapat

disajikan kepada masyarakat luas dan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari suatu daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan tersistem akan meningkatkan hasil kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Kabupaten Boalemo menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo, memiliki 7 Kecamatan yaitu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Wonosari, Dulupi, Tilamuta, Botumoito dan Mananggu. Tenaga kerja di Kabupaten Boalemo berdasarkan hasil rekapitulasi BPS Kabupaten Boalemo tahun 2015 sebanyak 63.504 (BPS.Kab Boalemo.go.id). Dalam laporan keuangan Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 BPK telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan menguji sistem pengendalian intern atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pengujian substantif terhadap akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada pemantauan itu juga BPK berharap agar pemeriksaan pendahuluan dapat bermanfaat untuk keuangan Pemkab Boalemo sehingga dapat meningkatkan persentase akuntabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam mengelola keuangan, pengukuran kinerja keuangan terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ulum (2012) Rasio kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio

efektivitas dan efisiensi PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan target yang berpotensi riil daerah.

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Kabupaten Boalemo diukur dari Rasio Kemandirian Daerah diukur melalui laporan keuangan tahun 2015-2020 dengan menggunakan rumus dari Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka pada tahun anggaran 2015 sebesar 6,52%, naik pada tahun 2016 sebesar 6,73%, pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 9,35%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,35%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,17% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 6,80%. Yang berarti dari hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Boalemo rendah. Semakin rendah rasio kemandirian daerah berarti tingkat tergantung daerah terhadap sumber dana eksteren (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi.

Sesuai dengan Halim (2007) menjelaskan bahwa melalui pola Hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

Kabupaten Boalemo berada di kemampuan keuangan Rendah Sekali di angka 0% - 25% yang menunjukkan pola hubungan Instruktif yang artinya peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2015 adalah 79,52%, pada tahun 2016 129,1%, pada tahun 2017 112,2%, pada tahun 2018 111,7%, pada tahun 2019 101,3% dan pada 2020 90,49%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam kinerja keuangan pemerintah melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah dari 100%. Perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio pada tahun 2015 11,85%, pada tahun 2016 13,91%, pada tahun 2017 9,97%, pada tahun 2018 13,25%, pada tahun 2019 10,59% dan pada

tahun 2020 13,54%. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

**Tabel 1.2 Rasio Aktivitas Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Belanja Operasi	62,22%	62,48%	58,49%	64,33%	64,72%	60,70%
Rasio Belanja Modal	28,8%	23,86%	26,16%	23,98%	21,41%	21,39%

Sumber : Data Olahan Peneliti (2021)

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun naik turun.

Tabel 1.3 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	-	1,23 %	46,91 %	- 21,85 %	26,22 %	-30,10 %
Pendapatan	-	11,13 %	7,46 %	- 0,47%	3,47 %	-6,53 %
Belanja Operasi	-	11,04 %	0,60 %	9,45 %	4,11 %	-1,23 %
Belanja Modal	-	-8,66 %	17,82 %	-7,59%	-7,59%	-6,65 %

Sumber : Data Olahan Peneliti (2021)

Dari perhitungan rasio pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2015-2016 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif. Hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Pada Tahun 2016-2017 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi, belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2017-2018 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif. Hanya belanja operasi yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Pada tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi, belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif.

Berkaitan dengan latar belakang dan fenomena yang telah dilakukan maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sejalan. Wardani & Andriyani (2017) meneliti tentang kualitas laporan keuangan. Dalam

hal ini peneliti menggunakan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern. Penelitian selanjutnya (Chodijah & Hidayah, 2018) menggunakan variabel Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal. Pada tahun yang sama, Anggreni & Putri (2018) menggunakan variabel Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Pada tahun yang sama juga Ramadhani, Soerono & Mulyasari (2018) Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrua. Penelitian selanjutnya Suryaningsih (2019) Menggunakan Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020) menggunakan variabel Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern. Pada tahun yang sama, Dewi Krisna & Dewi Marvilianti (2020) menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pemahaman Basis Akrua, Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Namun dalam data PEMDA Boalemo maka peneliti menduga bahwa variabel yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah

(X₂), pemanfaatan teknologi informasi (X₃), sistem akuntansi keuangan daerah (X₄).

Faktor dalam kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini juga berperan penting untuk meningkatkan perekonomian baik pusat maupun daerah. Dalam hal meningkatkan ekonomi makro diharapkan agar laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing penanggung jawab akan menghasilkan laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami maupun transparansi karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik maka instansi mengharapkan pegawai dapat bekerja dengan baik sehingga dalam meningkatkan hasil laporan keuangan yang baik maka pegawai harus berkompeten dan sesuai dengan kemampuan serta keahlian dibidangnya masing-masing serta dapat mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan PP No 60 tahun 2008 pasal 6 mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; a. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; b. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan c. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Tidak hanya kompetensi sumber daya manusia, faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian intern pemerintahan. Husna (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (spip) pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Telaahan Atas LKPD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, 2018).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (PP Nomor 56 Tahun 2005), pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja

secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Husna, 2017).

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Namun badan pemeriksa keuangan masih banyak menemukan kelemahan berkaitan dengan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah (Patra, Bustami & Hasriani, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Boalemo (Studi pda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo?
3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo?
4. Apakah terdapat pengaruh system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan serta informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pemahaman dalam akuntansi kedepannya dan sekaligus menjadi bahan referensi dalam menambah wawasan atas teori-teori yang sudah ada dan dipelajari secara langsung di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kabupaten Boalemo atas hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga sebagai sumbangsi pemikiran kepada Kabupaten Boalemo dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.